

Political Coalition : Comparative Case Study of the Malaysian and Indonesian Government Systems 2015-2022

Koalisi Politik : Studi Kasus Perbandingan Sistem Pemerintahan Malaysia dan Indonesia Tahun 2015-2022

Aurell Safa Salsabila¹, Della Nasella², Dwi Happy Paramita³, Tiara Yuri Julianzie⁴, Vina Aprilia Putri⁵, Indra Tamsyah⁶

Universitas Siwijaya^{1,2,3,4,5,6}

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan membandingkan dinamika koalisi politik dalam sistem pemerintahan Malaysia dan Indonesia periode 2015–2022, dengan fokus pada pembentukan dan keberlanjutan pemerintahan koalisi. Metode yang digunakan adalah studi kasus perbandingan, menganalisis data kualitatif dari perkembangan politik di kedua negara. Hasil temuan menunjukkan bahwa Malaysia mengalami krisis politik akibat tidak adanya koalisi yang meraih mayoritas mutlak di parlemen, sehingga pembentukan pemerintahan sangat bergantung pada negosiasi antar koalisi, seperti yang terjadi pada Pemilu 2022 saat Pakatan Harapan harus berkoalisi dengan partai lain untuk membentuk kabinet di bawah Anwar Ibrahim. Sementara di Indonesia, sistem presidensial memberikan stabilitas lebih pada koalisi pemerintahan.

Kata-Kata Kunci: Koalisi politik, Sistem pemerintahan, Malaysia, Indonesia.

Abstract:

This study aims to compare the dynamics of political coalitions in the Malaysian and Indonesian government systems for the 2015–2022 period, with a focus on the formation and sustainability of coalition governments. The method used is a comparative case study, analyzing qualitative data from political developments in both countries. The findings show that Malaysia is experiencing a political crisis due to the absence of a coalition that has an absolute majority in parliament, so that the formation of a government is highly dependent on negotiations between coalitions, as happened in the 2022 Election when Pakatan Harapan had to form a coalition with other parties to form a cabinet under Anwar Ibrahim. Meanwhile, in Indonesia, the presidential system provides more stability to the government coalition. In conclusion, the coalition in Malaysia is more vulnerable to political change and crisis than Indonesia. It is recommended that both countries strengthen the coalition mechanism for the sake of government stability.

Keywords: Political coalition, government system, Malaysia, Indonesia.

Korespondensi:

Aurell Safa Salsabila (aurelc461@gmail.com)

Pendahuluan

Koalisi politik memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan di negara-negara dengan sistem multi-partai seperti Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, sejak era reformasi, sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi-partai menuntut pembentukan koalisi sebagai upaya menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, koalisi yang terbentuk sering kali bersifat pragmatis dan berbasis kepentingan jangka pendek, bukan pada kesamaan ideologi atau visi politik. Akibatnya, efektivitas pemerintahan kerap terganggu oleh dinamika internal koalisi yang rentan berubah seiring kepentingan partai. Ketika ada pergantian anggota koalisi atau perpecahan di dalamnya, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lambat, penuh konflik kepentingan, dan berpotensi memicu perubahan kabinet yang tidak hanya menghambat jalannya pemerintahan tetapi juga memengaruhi implementasi kebijakan secara keseluruhan. Di samping itu, koalisi yang terbentuk sering kali memerlukan negosiasi panjang terkait pembagian jabatan, baik di kementerian maupun posisi strategis lainnya, sehingga alokasi kekuasaan tidak selalu mencerminkan efektivitas, melainkan hasil kompromi politik yang sulit dihindari. Meskipun demikian, koalisi tetap dianggap sebagai jalan paling rasional dalam mempertahankan stabilitas politik, terutama ketika tidak ada partai dominan yang mampu memerintah secara mandiri (Widayati, 2020); (Isnaini, 2020).

Di Malaysia, peran koalisi politik juga tidak kalah krusial, terutama setelah pergeseran kekuatan politik pasca Pemilu 2018 yang mengakhiri dominasi koalisi Barisan Nasional dan memberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan. Kemenangan oposisi ini menandai babak baru dalam politik Malaysia dengan meningkatnya persaingan antar koalisi dan perubahan aliansi yang dinamis. Namun, kurangnya institusionalisasi koalisi membuat stabilitas politik cenderung rapuh, sebagaimana terlihat pada Pemilu 2022 yang menghasilkan parlemen gantung dan memicu negosiasi intensif untuk membentuk pemerintahan. Aliansi yang terjalin sering kali tidak solid dan rentan terhadap perpecahan ketika terjadi perbedaan pandangan atau kepentingan di antara anggota partai koalisi. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi koalisi di Malaysia belum sepenuhnya matang dan masih didominasi oleh pertimbangan pragmatis ketimbang persamaan ideologis. Situasi ini pada akhirnya berdampak pada stabilitas pemerintahan yang mudah terguncang oleh

konflik internal maupun perubahan aliansi secara tiba-tiba. Dengan demikian, koalisi politik tidak hanya menjadi alat untuk meraih kekuasaan, tetapi juga faktor penting yang menentukan stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan di Indonesia dan Malaysia, meskipun keduanya menghadapi tantangan yang berbeda dalam membangun koalisi yang stabil dan efektif (Ufan, 2009).

Pasca-2015, politik Malaysia memasuki fase penuh ketegangan dan perubahan drastis yang dipicu oleh skandal korupsi besar. Skandal 1MDB yang melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak tidak hanya mengguncang kepercayaan publik terhadap Barisan Nasional (BN), tetapi juga merusak citra koalisi tersebut yang telah berkuasa sejak kemerdekaan pada 1957. Skandal ini memicu gelombang protes serta kebangkitan oposisi, terutama koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. Akumulasi kemarahan publik terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan mencapai puncaknya pada Pemilu Umum ke-14 (GE-14) tahun 2018, ketika PH berhasil memenangkan pemilu dan mengakhiri dominasi politik BN selama lebih dari enam dekade (Skanthakumar, 2023).

Namun, euforia kemenangan tersebut tidak bertahan lama. Ketegangan internal dalam koalisi PH serta perbedaan pandangan politik menyebabkan pemerintahan ini runtuh pada awal 2020, hanya dua tahun setelah berkuasa. Krisis politik ini membuka jalan bagi pembentukan koalisi Perikatan Nasional (PN) di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, yang kemudian juga menghadapi ketidakstabilan politik. Pergantian kepemimpinan kembali terjadi ketika Ismail Sabri Yaakob dari BN mengambil alih jabatan Perdana Menteri pada 2021. Situasi politik yang dinamis dan tidak menentu ini menunjukkan adanya fragmentasi kekuatan politik di Malaysia, yang semakin kompleks dengan adanya persaingan antar koalisi besar seperti BN, PH, dan PN.

Koalisi politik memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan di negara-negara dengan sistem multi-partai seperti Malaysia. Setelah Pemilu Umum ke-15 (GE-15) pada 2022, tidak ada satu pun koalisi yang memperoleh mayoritas mutlak di parlemen, sehingga menimbulkan parlemen gantung dan memicu negosiasi intensif. Pada akhirnya, terbentuklah pemerintahan "persatuan dan stabilitas" di bawah Anwar Ibrahim dari PH, didukung oleh BN serta partai-partai dari Malaysia Timur. Meskipun pembentukan pemerintahan ini membawa harapan baru, tantangan tetap ada, terutama dalam menyelaraskan visi politik dari koalisi yang heterogen dengan latar belakang ideologi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi koalisi di Malaysia

belum sepenuhnya matang dan masih didominasi oleh pertimbangan pragmatis ketimbang persamaan ideologis. Ketegangan politik pasca-2015 ini mencerminkan kompleksitas politik Malaysia kontemporer, yang tidak hanya ditandai oleh pergeseran kekuasaan tetapi juga oleh polarisasi politik yang semakin tajam di kalangan masyarakat.

Dinamika politik Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama terkait pembentukan koalisi politik dalam pemerintahan pasca-2015. Pada periode 2014–2019, pemilu presiden menghasilkan dua kubu besar, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung Prabowo Subianto. Pada awalnya, Jokowi menghadapi tantangan besar karena mayoritas kursi di parlemen masih dikuasai oleh KMP. Ketegangan politik terlihat jelas ketika partai-partai oposisi seperti PAN, Golkar, dan PPP menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa partai yang sebelumnya berada di kubu oposisi mulai bergabung dengan koalisi pemerintah. Pergeseran dukungan ini mencerminkan pragmatisme politik yang didorong oleh keinginan untuk mempertahankan akses kekuasaan dan meredam potensi konflik politik (Hamid, 2025).

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi (2019–2024), koalisi pemerintah semakin solid dengan dukungan dari partai-partai besar, termasuk partai oposisi utama pada periode sebelumnya. Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjadi rival politik Jokowi dalam dua pemilu presiden berturut-turut, bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik politik yang sebelumnya sengit dapat bertransformasi menjadi kerja sama pragmatis ketika ada kepentingan bersama. Pergeseran dari oposisi ke koalisi ini menggambarkan fleksibilitas politik Indonesia yang cenderung mengutamakan stabilitas pemerintahan ketimbang mempertahankan garis oposisi yang tegas. Meskipun berhasil meredam ketegangan politik secara formal, situasi ini juga memunculkan kritik terkait hilangnya oposisi kuat yang dapat menjalankan fungsi check and balance terhadap kekuasaan eksekutif.

Namun, dinamika politik Indonesia tetap tidak sepenuhnya stabil. Meskipun koalisi besar berhasil dibentuk, ketegangan tetap muncul dalam bentuk protes publik terhadap kebijakan kontroversial seperti Omnibus Law dan RUU KUHP, yang dipandang mengabaikan aspirasi masyarakat. Demonstrasi besar yang melibatkan mahasiswa dan organisasi masyarakat menunjukkan bahwa konsolidasi politik di tingkat elit tidak selalu sejalan dengan kehendak

akar rumput. Selain itu, menjelang Pemilu 2024, muncul pergeseran konstelasi politik dengan adanya partai baru dan tokoh politik muda yang mencoba menawarkan alternatif kepemimpinan. Situasi ini menggambarkan bahwa meskipun koalisi besar berhasil mempertahankan stabilitas pemerintahan, dinamika politik tetap hidup dan berkembang dengan adanya tuntutan reformasi dari masyarakat sipil.

Koalisi politik merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan demokratis, baik dalam konteks parlementer maupun presidensial. Dalam sistem parlementer, pembentukan koalisi umumnya terjadi karena tidak adanya satu partai yang mampu meraih mayoritas mutlak di parlemen, sehingga diperlukan kerja sama antarpolisi untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Sebaliknya, dalam sistem presidensial, meskipun kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki otoritas eksekutif yang kuat, koalisi tetap dibutuhkan untuk menjaga dukungan legislatif guna memastikan kelancaran agenda pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perbedaan dan relevansi koalisi di kedua sistem pemerintahan ini menjadi penting dalam konteks politik kontemporer.

Malaysia sebagai negara dengan sistem demokrasi parlementer berbasis monarki konstitusional sering kali menghadapi dinamika koalisi yang fluktuatif. Dalam sistem ini, koalisi menjadi prasyarat mutlak bagi pembentukan pemerintahan, terutama ketika tidak ada satu partai pun yang meraih mayoritas absolut dalam pemilu. Fenomena ini terlihat jelas pada Pemilu 2022, ketika tidak ada partai yang berhasil mengamankan mayoritas kursi, sehingga Anwar Ibrahim membentuk koalisi multi-etnis untuk mengonsolidasikan kekuatan politik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem parlementer, keberlangsungan pemerintahan sangat bergantung pada soliditas koalisi. Pergantian dukungan politik di parlemen dapat langsung mengguncang posisi perdana menteri dan kestabilan kabinet, membuat pembentukan dan pemeliharaan koalisi menjadi isu sentral dalam pemerintahan (Ibrahim, 2024).

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan sistem presidensial menghadapi tantangan koalisi yang berbeda. Meskipun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan secara teoritis memiliki legitimasi yang kuat, dalam praktiknya, presiden tetap membutuhkan dukungan partai politik di parlemen untuk menjalankan program pemerintah. Hal ini disebabkan oleh sistem multipartai yang kompleks, sehingga presiden sering kali membentuk koalisi politik sebagai strategi memperkuat dukungan legislatif. Contohnya, pada masa

pemerintahan Joko Widodo, terbentuk koalisi besar yang melibatkan beberapa partai politik besar guna menjaga stabilitas pemerintahan dan memuluskan agenda kebijakan. Namun demikian, pembentukan koalisi dalam sistem presidensial tidak secara langsung menentukan keberlangsungan pemerintahan, tetapi lebih pada strategi politik untuk menjaga hubungan baik antara eksekutif dan legislatif (Evangelista, 2015).

Namun demikian, baik dalam sistem parlementer Malaysia maupun presidensial Indonesia, isu koalisi tetap memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik. Kompleksitas dalam membentuk dan mempertahankan koalisi menggambarkan tantangan tersendiri dalam menjaga efektivitas pemerintahan. Koalisi yang rapuh dapat memicu ketidakpastian politik dan menghambat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, studi komparatif mengenai relevansi koalisi dalam kedua sistem pemerintahan ini sangat penting untuk memahami hubungan antara struktur politik dan stabilitas pemerintahan. Penelitian ini akan memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika koalisi di Malaysia dan Indonesia dalam periode 2015–2022, mengingat kedua negara ini menghadapi tantangan politik yang berbeda meskipun sama-sama berada dalam konteks demokrasi multipartai.

Logika Koalisi Politik

Dalam memahami dinamika koalisi politik di Indonesia dan Malaysia, penting untuk terlebih dahulu memahami hubungan antara sistem pemerintahan dan pembentukan koalisi partai politik. Teori koalisi politik merupakan pendekatan dalam ilmu politik yang menyoroti bagaimana partai-partai atau kelompok politik membentuk aliansi untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan, khususnya dalam sistem parlementer atau sistem multipartai. Dalam konteks ini, pembentukan koalisi menjadi langkah strategis yang sangat penting, mengingat tidak adanya partai mayoritas tunggal yang dapat memerintah sendiri. Teori ini menjelaskan bahwa pembentukan koalisi tidak hanya didorong oleh kebutuhan matematis untuk meraih mayoritas di parlemen, tetapi juga oleh kepentingan strategis, ideologis, dan distribusi kekuasaan di antara aktor politik.

Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang relatif independen dari parlemen. Sementara itu, Malaysia menganut sistem parlementer, di mana koalisi partai menjadi penentu

utama terbentuknya pemerintahan dan kelangsungan kepemimpinan perdana menteri. Dalam konteks ini, teori koalisi sistem presidensial vs parlementer yang dikemukakan oleh (Jos'e Antonio Cheibub, 2004) sangat relevan. Mereka menekankan bahwa koalisi dalam sistem presidensial lebih bersifat legislatif, dibentuk untuk mendukung kelangsungan kebijakan presiden, sedangkan dalam sistem parlementer, koalisi bersifat eksekutif, sangat menentukan siapa yang memerintah dan sejauh mana pemerintah dapat bertahan.

Lebih lanjut, teori office-seeking dan policy-seeking yang dikembangkan oleh (Michael Laver, 1990) memberikan kerangka untuk memahami motif pembentukan koalisi. Dalam pendekatan office-seeking, partai-partai bergabung dalam koalisi demi mendapatkan jabatan dan sumber daya politik. Sebaliknya, dalam pendekatan policy-seeking, koalisi dibentuk atas dasar kesamaan ideologis dan kepentingan kebijakan. Pendekatan ini penting untuk membedah mengapa koalisi di Indonesia cenderung bersifat inklusif dan besar (big tent coalition), sementara di Malaysia, terutama pasca-2018, koalisi mengalami dinamika dan keretakan yang lebih sering, seiring adanya perbedaan ideologis dan agenda politik yang lebih tajam.

Dalam menggunakan teori di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif untuk mengkaji dinamika koalisi politik dan stabilitas pemerintahan dalam dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem parlementer di Malaysia dan sistem presidensial di Indonesia, dalam rentang waktu 2015 hingga 2022. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, motif, serta proses politik di balik pembentukan dan keberlangsungan koalisi pemerintahan, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam pola-pola yang muncul di kedua negara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan pengumpulan data sekunder. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen resmi pemerintah dan partai politik. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan berita politik dari media massa kredibel dan laporan hasil pemilu dari lembaga penyelenggara pemilu di masing-masing negara. Dengan memadukan beragam sumber, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika politik dan koalisi pemerintahan yang terjadi selama periode kajian.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis politik komparatif dengan menerapkan metode studi kasus lintas negara

(cross-national case study). Analisis dilakukan dengan cara membandingkan variabel-variabel utama seperti bentuk koalisi (minimal winning, rainbow), stabilitas pemerintahan, pola hubungan antar elite, serta peristiwa politik penting yang memengaruhi keberlangsungan pemerintahan di Malaysia dan Indonesia. Melalui teknik ini, peneliti berupaya mengidentifikasi pola umum dan faktor kontekstual yang membedakan atau menyamakan kedua negara dalam hal hubungan antara struktur koalisi politik dan tingkat stabilitas pemerintahan.

Stabilitas dan Efektivitas Pemerintahan

Studi tentang stabilitas dan efektivitas pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana koalisi politik dibentuk dan dikelola dalam suatu sistem pemerintahan. Koalisi menjadi mekanisme penting dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan, terutama di negara-negara yang memiliki sistem multipartai. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, meskipun keduanya memiliki sistem pemerintahan yang berbeda Indonesia dengan sistem presidensial dan Malaysia dengan sistem parlementer keduanya sama-sama menghadapi tantangan dalam membangun dan mempertahankan koalisi politik yang stabil. Stabilitas pemerintahan dapat dilihat dari sejauh mana koalisi yang terbentuk mampu menopang keberlangsungan kekuasaan eksekutif, mencegah krisis politik, dan menjamin kelancaran proses legislasi. Sementara efektivitas dapat diukur dari kemampuan pemerintahan dalam menjalankan agenda kebijakan secara konsisten dan responsif.

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam studi ini dapat dikategorikan sebanding karena terdapat sejumlah kesamaan mendasar yang membuat keduanya layak dibandingkan secara setara. Pertama, kedua negara adalah negara demokrasi elektoral di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pengalaman transisi politik pasca-Orde Baru (Indonesia) dan pasca-Reformasi (Malaysia). Kedua, baik Indonesia maupun Malaysia menganut sistem multipartai yang kompleks, di mana pembentukan koalisi menjadi keniscayaan untuk mencapai mayoritas politik, baik di parlemen maupun dalam membentuk kabinet. Ketiga, periode 2015–2022 ditandai dengan dinamika politik yang intens di kedua negara: Indonesia mengalami konsolidasi koalisi besar di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, sementara Malaysia menghadapi pergantian koalisi dan perdana menteri secara berulang pasca-keruntuhan koalisi Pakatan Harapan. Kondisi ini memberikan ruang yang relevan untuk

menilai bagaimana perbedaan sistem pemerintahan memengaruhi ketahanan dan performa koalisi politik dalam menopang stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Dengan kata lain, perbandingan ini tidak hanya menyajikan dua kasus yang serupa secara struktural, tetapi juga kontras secara institusional memberikan pembelajaran yang kaya untuk analisis komparatif.

Konteks Politik Malaysia

Politik Malaysia didasarkan pada sistem parlementer demokratis dengan raja konstitusional sebagai kepala negara. Sistem ini berarti bahwa kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, yang harus memiliki dukungan mayoritas di parlemen (Dewan Rakyat). Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong, yaitu raja Malaysia, memiliki peran simbolik, tetapi dalam situasi tertentu seperti ketika tidak ada mayoritas jelas setelah pemilu raja memiliki kewenangan menunjuk perdana menteri berdasarkan siapa yang diyakini mendapat dukungan terbanyak di parlemen.

Malaysia memiliki sistem multipartai yang kompleks, dengan partai-partai politik yang mewakili berbagai kelompok etnis dan kepentingan ideologis. Politik identitas sangat kental, terutama antara kelompok mayoritas Melayu-Muslim dan kelompok non-Melayu (seperti Tionghoa dan India). Oleh karena itu, banyak partai dan koalisi terbentuk berdasarkan aliansi pragmatis antar etnis dan ideologi.

Dalam sistem parlementer demokratis, partai-partai politik memegang peran sentral dalam proses pemerintahan dan pembentukan kekuasaan. Partai politik utama di Malaysia mencerminkan kompleksitas etnis dan agama negara tersebut. UMNO (United Malays National Organisation) adalah kekuatan dominan dalam sejarah Malaysia pascakemerdekaan, sebagai tulang punggung koalisi Barisan Nasional (BN). Namun, dominasi ini mulai tergeser sejak Pemilu 2018, saat koalisi Pakatan Harapan (PH) memenangkan kekuasaan untuk pertama kalinya. PH terdiri dari partai-partai berhaluan reformis dan multi-etnis seperti PKR, DAP, dan Amanah, serta didukung sementara oleh BERSATU yang saat itu dipimpin oleh Mahathir Mohamad. Sementara itu, Perikatan Nasional (PN), koalisi baru yang muncul pada 2020, didominasi oleh BERSATU dan PAS yang berfokus pada agenda Melayu-Muslim konservatif.

Dinamika Koalisi Politik Malaysia

Pada tahun 2015, politik Malaysia mulai diguncang oleh skandal besar 1MDB (1Malaysia Development Berhad), yang melibatkan Perdana Menteri saat itu, Najib Razak, dan dugaan penyelewengan dana miliaran ringgit. Skandal ini tidak hanya mencoreng citra pemerintahan Barisan Nasional (BN), tetapi juga memicu perpecahan internal dalam partai UMNO yang selama ini mendominasi politik Malaysia. Salah satu tokoh yang keluar dari UMNO karena skandal ini adalah Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri dan tokoh senior UMNO.

Mahathir kemudian bergabung dengan oposisi dan ikut membentuk Pakatan Harapan (PH), koalisi partai-partai reformis seperti PKR (Parti Keadilan Rakyat) yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, DAP (Democratic Action Party) yang berbasis Tionghoa, serta Parti Amanah Negara yang merupakan pecahan dari PAS. Di tengah kemarahan publik terhadap korupsi dan isu biaya hidup, koalisi ini mendapat momentum.

Pemilihan Umum ke-14 Malaysia pada tahun 2018 menjadi titik balik penting dalam lanskap politik negara tersebut, ditandai dengan terbentuknya koalisi Pakatan Harapan yang berhasil menggantikan kekuasaan Barisan Nasional (Ng et al., 2021). Peristiwa ini mencerminkan kebangkitan Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, serta kembalinya Mahathir Mohamad ke panggung politik nasional sebagai tokoh sentral dalam koalisi yang menantang dominasi lama UMNO (Pogadaev, 2023; Fatayati, 2017). Dengan kemenangan ini, Mahathir kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada usia 92 tahun, menjadikannya pemimpin tertua di dunia yang terpilih secara demokratis (Chin, 2018). Hasil pemilu juga mencerminkan adanya pergeseran pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan dan arah politik Malaysia.

Namun, pemerintahan Pakatan Harapan tidak bertahan lama. Ketegangan internal muncul, terutama antara BERSATU (partai baru Mahathir) dan PKR, serta ketidakpuasan sebagian elite terhadap peralihan kekuasaan dari Mahathir ke Anwar sebagaimana dijanjikan. Pada awal 2020, Mahathir mengundurkan diri, memicu kekosongan kekuasaan.

Melalui manuver politik yang dikenal sebagai “Langkah Sheraton”, koalisi baru bernama Perikatan Nasional (PN) terbentuk, dipimpin oleh Muhyiddin Yassin, dan didukung oleh BERSATU, PAS, dan UMNO. Pemerintahan ini dibentuk tanpa pemilu, memanfaatkan sistem parlementer di

mana mayoritas parlemen dapat membentuk kabinet baru. Perubahan ini memicu kritik karena dianggap “pengkhianatan mandat rakyat.”

Namun, pemerintahan PN juga tidak stabil. Dalam suasana pandemi COVID-19 dan ketegangan politik, Muhyiddin kehilangan dukungan mayoritas dan akhirnya mengundurkan diri pada Agustus 2021. Ia digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob dari UMNO, yang memimpin hingga Pemilu 2022.

Pemilu pada November 2022 menghasilkan parlemen gantung (hung parliament), di mana tidak ada satu koalisi pun yang berhasil meraih mayoritas mutlak. Setelah melalui negosiasi politik dan intervensi konstitusional oleh Yang di-Pertuan Agong, Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri ke-10, memimpin pemerintahan persatuan nasional yang mencakup partai-partai yang sebelumnya berseberangan, termasuk UMNO dan Pakatan Harapan.

Konteks Politik Indonesia

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini memberikan presiden masa jabatan tetap dan relatif kebal terhadap perubahan dukungan politik jangka pendek (Hidayat, 2016). Namun, dalam praktiknya, presiden tetap memerlukan dukungan dari parlemen untuk kelancaran proses legislasi dan pelaksanaan kebijakan strategis. Selama dua periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk koalisi besar. Pada periode pertama (2014–2019), Jokowi didukung oleh PDIP, NasDem, PKB, dan Hanura. Sedangkan dalam periode kedua (2019–2024), koalisi melebar dengan masuknya partai-partai besar seperti Golkar, PPP, dan bahkan Partai Gerindra yang sebelumnya merupakan oposisi (Goodman, 2019).

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi (2014–2019), koalisi pemerintahan dikenal sebagai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura. Koalisi ini memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan koalisi oposisi pimpinan Prabowo Subianto (Gerindra), bersama Golkar, PAN, dan PKS. Situasi ini sempat menyebabkan ketegangan antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam perebutan posisi pimpinan DPR. Namun, seiring berjalannya waktu, Jokowi berhasil memperluas dukungan politik dengan merangkul partai-partai dari KMP seperti Golkar dan PAN. Hal ini memperkuat stabilitas koalisi pemerintah

menjelang akhir periode pertama. Langkah ini juga mencerminkan pendekatan pragmatis Jokowi dalam membangun konsolidasi kekuasaan (Mietzner, 2015).

Memasuki periode kedua (2019–2024), koalisi pemerintahan Jokowi semakin membesar. Ia didukung oleh PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, dan Hanura. Yang menarik, Jokowi juga mengajak Partai Gerindra, yang sebelumnya menjadi rival utama dalam Pilpres 2019, untuk bergabung ke dalam kabinet. Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, diangkat menjadi Menteri Pertahanan, sementara Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo, menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Masuknya Gerindra menandai hampir tidak adanya oposisi yang efektif di parlemen. Hal ini memperlihatkan karakteristik sistem presidensial Indonesia yang memungkinkan presiden membentuk "koalisi pelangi", yakni koalisi yang luas dan beragam, demi menjaga stabilitas pemerintahan (Hidayat, 2016). Namun, perlu dicatat bahwa koalisi besar ini juga menimbulkan kekhawatiran atas lemahnya fungsi pengawasan oleh oposisi dan potensi kompromi terhadap nilai-nilai demokrasi.

Dinamika Koalisi Politik Indonesia

Dalam sistem presidensial Indonesia, meskipun presiden tidak tergantung langsung pada dukungan parlemen untuk mempertahankan jabatannya, koalisi tetap menjadi elemen penting untuk kelancaran pemerintahan. Jokowi menggunakan pendekatan koalisi inklusif yang bersifat pragmatis dan fleksibel dalam dua periode pemerintahannya. Pada awal periode 2014–2019, terdapat dua blok besar: Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Jokowi dan Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi. KIH terdiri dari PDIP, NasDem, PKB, dan Hanura, sedangkan KMP terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, dan PKS (Mietzner, 2015).

Namun, dinamika ini berubah secara signifikan setelah beberapa partai dari KMP mulai bergeser ke posisi pendukung pemerintah. Golkar, misalnya, secara resmi bergabung ke pemerintahan Jokowi pada pertengahan 2016. PAN juga sempat mendukung pemerintah meskipun posisinya kerap berubah (Kaplan, 2017). Perubahan paling mencolok terjadi pada periode kedua Jokowi (2019–2024), ketika Partai Gerindra yang sebelumnya menjadi oposisi utama, masuk ke dalam kabinet. Prabowo Subianto diangkat sebagai Menteri Pertahanan, dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Langkah ini secara efektif melemahkan oposisi di parlemen karena

mayoritas partai besar telah menjadi bagian dari pemerintahan. Masuknya Gerindra ke dalam koalisi menggambarkan kecenderungan koalisi pelangi (rainbow coalition) dalam politik Indonesia, yakni menyatukan hampir semua kekuatan politik dalam satu pemerintahan. Meskipun koalisi ini meningkatkan stabilitas politik secara signifikan, ia juga mengurangi fungsi oposisi yang sehat dan mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi (Hidayat, 2016).

Dalam hal stabilitas pemerintahan, Indonesia menunjukkan ketahanan politik yang tinggi selama periode 2015–2022. Jokowi berhasil menyelesaikan masa jabatannya dengan dukungan legislatif yang kuat dan tanpa pergantian presiden atau krisis kabinet yang berarti. Ini sangat kontras dengan situasi di Malaysia, di mana koalisi parlemen yang rapuh menyebabkan tiga kali pergantian perdana menteri hanya dalam waktu empat tahun.

Perbandingan Malaysia vs Indonesia

Malaysia dan Indonesia menawarkan dua model sistem pemerintahan yang kontras namun sama-sama berada dalam konteks demokrasi elektoral yang kompleks. Malaysia menganut sistem parlementer berbasis monarki konstitusional, di mana keberlangsungan pemerintahan sangat ditentukan oleh kestabilan koalisi partai di parlemen. Sebaliknya, Indonesia menggunakan sistem presidensial yang memberikan kekuasaan eksekutif yang relatif stabil dan tidak langsung bergantung pada dinamika dukungan legislatif untuk mempertahankan jabatan.

Dalam sistem parlementer seperti Malaysia, posisi perdana menteri sangat rentan terhadap perubahan dukungan politik. Sebuah koalisi yang rapuh atau kehilangan mayoritas di parlemen dapat segera memicu pengunduran diri atau dijatuhkannya perdana menteri melalui mosi tidak percaya. Hal ini tampak jelas pada periode 2018–2022, ketika Malaysia mengalami tiga kali pergantian perdana menteri dalam waktu kurang dari lima tahun akibat fragmentasi dan ketidakkonsistenan aliansi politik. Peristiwa seperti "Langkah Sheraton" menunjukkan bahwa koalisi yang terbentuk tanpa fondasi ideologis yang kuat sangat rentan terhadap perpecahan ketika terjadi konflik kepentingan antarpartai. Selain itu, peran Yang di-Pertuan Agong dalam menunjuk perdana menteri ketika tidak ada mayoritas jelas juga menambah dinamika unik dalam sistem parlementer Malaysia yang membedakannya dari praktik di negara lain. Meskipun koalisi di parlemen tetap penting untuk keberhasilan legislasi,

presiden tetap berkuasa selama tidak melakukan pelanggaran konstitusi yang serius.

Sebaliknya, sistem presidensial di Indonesia menyediakan masa jabatan presiden yang tetap selama lima tahun, dan tidak dapat diganggu gugat kecuali melalui proses pemakzulan konstitusional yang sangat ketat. Stabilitas ini memberikan keuntungan bagi presiden untuk merancang dan melaksanakan kebijakan jangka menengah hingga panjang tanpa ancaman instabilitas koalisi yang akut. Dalam praktiknya, Presiden Joko Widodo berhasil membentuk koalisi besar dan bahkan mampu merangkul partai-partai oposisi, termasuk rival politik utama seperti Partai Gerindra, ke dalam pemerintahan. Hal ini meminimalkan konflik antar partai dan meningkatkan efektivitas eksekutif, meskipun juga mengurangi kekuatan oposisi yang sehat (Hidayat, 2016).

Model ini menciptakan apa yang disebut sebagai rainbow coalition. Konsep Rainbow Coalition pertama kali dikenal luas di Amerika Serikat pada tahun 1969, ketika Fred Hampton dari Black Panther Party di Chicago membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok lain seperti Young Lords (Latino) dan Young Patriots (putih kelas pekerja dari Appalachia). Koalisi ini bertujuan untuk menyatukan orang-orang miskin dan kelas pekerja lintas ras dalam perjuangan melawan kemiskinan, rasisme, kekerasan polisi, dan ketidakadilan sosial lainnya.

Namun, keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas eksekutif melalui koalisi besar juga menimbulkan dilema demokratis. Ketika hampir semua partai besar berada dalam koalisi pemerintahan, maka fungsi oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan (checks and balances) menjadi sangat lemah. Hal ini berpotensi menciptakan ruang otoritarianisme dalam balutan demokrasi elektoral, di mana kontrol terhadap pemerintah menjadi minim dan ruang kritik menyempit. Di sisi lain, Malaysia yang tampak lebih tidak stabil, justru mempertahankan oposisi yang lebih aktif di parlemen, meskipun hal ini datang dengan harga berupa seringnya krisis kepemimpinan dan fragmentasi politik.

Dari sudut pandang teori koalisi, Malaysia menunjukkan pola policy-seeking coalition yang semestinya berbasis pada agenda reformasi, namun dalam praktiknya sering terjerumus ke dalam office-seeking coalition yang berbasis pada kepentingan jabatan semata. Sementara Indonesia cenderung menunjukkan pola office-seeking yang dominan, dengan partai-partai yang masuk koalisi demi memperoleh posisi strategis, meskipun secara formal membawa stabilitas. Dalam jangka panjang, model Indonesia dapat menciptakan

koalisi yang kuat tetapi kurang substantif secara ideologis, sedangkan model Malaysia mencerminkan kebutuhan akan reformasi institusional yang mendalam untuk membangun koalisi yang lebih konsisten dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, perbandingan antara Malaysia dan Indonesia tidak hanya merefleksikan perbedaan sistem pemerintahan secara struktural, tetapi juga memperlihatkan bagaimana desain kelembagaan, budaya politik, dan perilaku elite turut membentuk wajah demokrasi dan pola kekuasaan di masing-masing negara. Studi ini memberikan pelajaran penting bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna: sistem presidensial menawarkan stabilitas dengan risiko konsentrasi kekuasaan, sementara sistem parlementer menyediakan fleksibilitas dengan risiko instabilitas. Tantangan ke depan bagi kedua negara adalah bagaimana mengelola koalisi politik secara lebih institusional, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata-mata pada kalkulasi kekuasaan jangka pendek.

Penutup

Studi perbandingan koalisi politik antara Malaysia dan Indonesia pada 2015–2022 menunjukkan bahwa perbedaan sistem pemerintahan sangat memengaruhi dinamika koalisi di kedua negara. Indonesia dengan sistem presidensial cenderung memiliki stabilitas eksekutif yang lebih tinggi karena koalisi politik lebih berfungsi sebagai pendukung kebijakan pemerintah, bukan penentu jatuh banggunya pemerintahan. Sebaliknya, Malaysia yang menganut sistem parlementer memperlihatkan koalisi yang lebih cair dan mudah berubah, sehingga sering kali menimbulkan ketidakstabilan politik akibat perubahan dukungan di parlemen.

Peran kepala negara dan kepala pemerintahan juga menjadi pembeda utama. Di Indonesia, presiden memegang kedua peran tersebut, sedangkan di Malaysia, kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri dan kabinet, sementara kepala negara bersifat simbolis. Hal ini membuat koalisi di Malaysia lebih pragmatis dan rentan terhadap pergeseran kekuatan politik, sementara di Indonesia koalisi cenderung lebih stabil karena presidennya tidak bisa dijatuhkan semata-mata oleh dinamika parlemen.

Namun, stabilitas yang tampak di Indonesia juga mengandung risiko tersendiri. Koalisi besar yang terbentuk justru menimbulkan kekhawatiran akan

menurunnya efektivitas fungsi oposisi dalam mengawasi kekuasaan. Pemerintahan yang didukung hampir seluruh kekuatan politik cenderung minim kritik internal, yang dapat mengakibatkan lemahnya proses checks and balances. Di sisi lain, di Malaysia, tingginya volatilitas koalisi memperlihatkan kelemahan dalam kelembagaan partai dan sistem insentif politik, yang berdampak pada kestabilan pemerintahan.

Untuk itu, diperlukan pembenahan struktural dalam tata kelola koalisi di kedua negara. Malaysia perlu membangun mekanisme koalisi yang lebih institusional dan berlandaskan kesepahaman ideologis serta kontrak politik yang transparan untuk mencegah terulangnya krisis kepercayaan dan kekosongan kepemimpinan. Sementara itu, Indonesia perlu menata ulang sistem pembagian kekuasaan dalam koalisi, agar tidak hanya menjadi alat bagi konsolidasi kekuasaan, tetapi tetap menjaga keberadaan oposisi yang kuat dan fungsional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas dan efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh bentuk sistem pemerintahan, tetapi juga oleh budaya politik, kapasitas institusi, dan desain sistem kepartaian. Oleh karena itu, penguatan demokrasi di kedua negara membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membangun sistem koalisi yang tidak hanya bertumpu pada kekuasaan, tetapi juga pada akuntabilitas, representasi, dan keberlanjutan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Chin, j. (2018). The comeback kid: mahathir and the 2018 malaysian general elections. *The round table*, 107(4), 535–537. <https://doi.org/10.1080/00358533.2018.1494692>
- evangelista, b. (2015). Eksistensi koalisi dalam sistem pemerintahan. *Jurnal ius*, 2(5), 338–348.
- Fatayati, s. (2017). Relevansi asas-asas pemilu sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. *Tribakti: jurnal pemikiran keislaman*, 28(1), 147–163. [10.33367/tribakti.v28i1.472](https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472)

- Faujiah, s. D. S. ., & nurdin, n. (2024). Sistem pemilu dan pembentukan koalisi minoritas study kasus malaysia (anwar ibrahim). *Jurnal syntax admiration*, 5(12), 5313-5325. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1645>
- Forsythe, m. (2021, january). Kleptopia: how dirty money is conquering the world by tom burgis (review). *Journal of democracy*, 32(1), 160-163.
- Goodman, s. W. (2019, october). Democracy and dictatorship in europe: from the ancien régime to the present day by sheri berman. *Journal of democracy*, 30(4), 170-173.
- Hamid, r. A. (2025). Indonesia's political shifts: from opposition to coalition in 2014–2024 elections. *Jurnal ilmu kepolisian*, 19(1), 121-135.
- Hidayat, s. (2016). Presidential system and political stability in indonesia. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, 20(1), 45-60.
- Ibrahim, a. (2024, december). Sistem pemilu dan pembentukan koalisi minoritas study kasus malaysia. *Jurnal syntax admiration*, 5(12), 5313-5325.
- Isnaini, i. (2020). Koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial indonesia. *Civics : pendidikan-penelitian-pengabdian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, 8(1), 93.
- Jos'e antonio cheibub, a. P. (2004). Government coalitions and legislative success under presidentialism and parliamentarism. *British journal of political science*, 34(4), 565-587.
- Michael laver, n. S. (1990). Multiparty government: the politics of coalition in europe. *Oxford university press*, 308.
- Mietzner, m. (2015, january 1). Reinventing asian populism: jokowi's rise, democracy, and political contestation in indonesia. *Jstor*, 1-91.
- Ng, j. W. J., rangel, g. J., & phung, y. C. (2021). Malaysia's 14th general election: dissecting the 'malaysian tsunami'—measuring the impacts of ethnicity and urban development on electoral outcomes. *Asian journal of political science*, 29(1), 42–66. <https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1814363>
- Pogadaev, v. A. (2023). Anwar ibrahim, the new prime minister of malaysia. *Asia & africa today*, 2, 42–47
- Skanthakumar, b. (2023, february 13). 'Malaysia after ge-15: 'a government with no direction'. Retrieved from international view point website.
- Ufan, a. (2009). The transformation of political party opposition in malaysia and its implications for the electoral authoritarian regime. *Democratization*, 16(3), 296-307.
- Widayati, w. (2020). Ideal combinations of government system and party system for stability and effectiveness of the government. *Jurnal pembaharuan hukum*, 6(3), 296–307.